



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNAIN
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 408525

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/116 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **195.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, VOLKSWAGEN MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **8.550.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **150.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.304.050.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.304.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EMAN SULAEMAN

NIK : 3271062310710004

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Sub Unit Kerja : PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 22 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : KHOIRUN ENISA MAHARINA
NIK : 3507197011910001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Sub Unit Kerja : PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 23 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RIESKA RAHMAWATI
NIK : 3671125701880001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Sub Unit Kerja : PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim : 30 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FARAHLI KHANSA
NIK : 3174055610960001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Sub Unit Kerja : PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 9 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.